

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi suatu negara mencerminkan bagaimana sumber daya dikelola untuk menciptakan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi domestik, investasi, dan ekspor komoditas. Stabilitas ekonomi nasional sangat dipengaruhi seperti kebijakan pemerintah dan infrastruktur. Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Pemerintah berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mengelola anggaran secara efektif untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta menciptakan lapangan pekerjaan (Azhar et al., 2025).

Dalam meningkatkan perkembangan ekonomi, pengelolaan anggaran diharapkan dapat menghasilkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif. Dengan pengelolaan anggaran yang optimal, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk program-program yang mendukung pengembangan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemberdayaan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar (Silva & Fadli, 2024). Selain itu, dengan mengurangi pemborosan anggaran, pemerintah dapat memperkuat daya saing ekonomi lokal dan menarik investasi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran berjalan efisien, efektif, dan akuntabel maka diperlukan pengukuran kinerja yang objektif (Mardiasmo, 2018).

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai capaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja merupakan unsur penting dalam suatu organisasi publik dan sangat dibutuhkan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran (Indrayani & Khairunnisa, 2019). Pengukuran ini bertujuan untuk

mengevaluasi sejauh mana anggaran yang digunakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan adanya pengukuran kinerja yang jelas, pemerintah dapat terus memperbaiki strategi pengelolaan anggaran dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Dengan demikian, perkembangan ekonomi yang sehat membutuhkan pengelolaan anggaran yang baik dan kinerja yang optimal, didukung oleh kesadaran masyarakat dalam mengawasi dan menuntut transparansi. Pertanggungjawaban menjadi kunci dalam memastikan bahwa anggaran digunakan secara bertanggung jawab, dan pengukuran kinerja menjadi alat untuk menilai efektivitas penggunaan dana (Priono et al., 2025). Keseluruhan proses ini saling terkait dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan efektif, sehingga pengelolaan anggaran dapat diawasi, dipertanggungjawabkan, dan digunakan secara optimal untuk meningkatkan pembangunan (Anggita Suridiyanti et al., 2024). Aspek tersebut termuat dalam pengukuran kinerja dengan metode *value for money*.

Menurut Mardiasmo (2018) *value for money* adalah suatu konsep pengelolaan kinerja organisasi sektor publik yang memiliki tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip *value for money* dalam pengukuran kinerja dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah kota untuk menerapkan mekanisme dan manajemen pemerintahannya, yang berpusat pada perencanaan dan pengendalian. Pelayanan publik yang baik memerlukan keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki dan akuntabilitas tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat. Dalam pengendalian anggaran pemerintah kota, pengukuran kinerja menggunakan konsep *value for money* adalah cara untuk menunjukkan bahwa pemerintah kota melakukan pemerintahan yang baik. Kinerja suatu organisasi dianggap optimal apabila organisasi tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan standar tinggi serta menekan biaya seminimal mungkin. Menurut Mardiasmo

(2018) kinerja yang baik tercapai ketika pengelolaan organisasi dan penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Manfaat *value for money* untuk pemerintah sebagai penyedia layanan publik yaitu efektivitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan mengurangi seluruh pemborosan pada setiap tindakan pemerintah sehingga biaya pelayanan publik menjadi lebih murah dan sumber daya yang digunakan selalu dihemat, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya dana publik dalam melaksanakan akuntabilitas publik (Mahsun, 2018).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep *value for money*, yang mana mengalami berbagai hambatan dalam penerapannya. Meskipun demikian, ada pula penelitian yang berhasil memenuhi kriteria konsep *value for money* dengan baik. Menurut Yuliyanda (2022), penelitian tersebut menyatakan bahwa kinerja yang diukur belum dapat mencapai tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas yang diharapkan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Hasanah & Hidayat (2023) menunjukkan hasil yang lebih positif, di mana kinerja yang diukur telah berhasil mencapai hasil yang ekonomis, telah mencapai target dan keseluruhan secara efisien, dan efektif sesuai dengan tujuan dalam konsep *value for money*.

Pemerintah Kota Probolinggo merupakan organisasi sektor publik. Sebagai organisasi sektor publik Pemerintah Kota Probolinggo mempunyai peran penting untuk menyediakan laporan keuangan sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik. Namun, tantangan dalam pencapaian kemandirian fiskal masih menjadi isu utama. Berdasarkan laporan dari Radar Bromo (12/11/2024), Pemerintah Kota Probolinggo merencanakan pendapatannya hanya Rp 981.877.481.350, dengan rincian, PAD ditargetkan Rp 242.541.964.799 dan pendapatan transfer baik dari pusat dan daerah ditargetkan sekitar Rp 739.335.516.551. Di sisi lain, proyeksi belanja daerah yang mencapai Rp 1.049.292.481.350. Secara umum, permasalahan utama terdapat pada kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah yang relatif rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi

efisiensi pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota Probolinggo. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menilai kinerja sektor publik Pemerintah Kota Probolinggo dengan menggunakan pendekatan konsep *value for money*. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan anggaran sehingga dapat diketahui sejauh mana sumber daya publik telah dikelola secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengukuran Kinerja Menggunakan Konsep *Value For Money* Pada Pemerintah Kota Probolinggo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu, “Bagaimana kinerja Pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan konsep *value for money*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur dan menganalisis kinerja Pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan konsep *value for money*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dibuat, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan serta meningkatkan kemampuan dalam pemecahan permasalahan terkait pengukuran kinerja Pemerintah Kota Probolinggo.

2. Manfaat Bagi Pemerintah Kota Probolinggo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Probolinggo.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan analisis pengukuran kinerja organisasi sektor publik.